



Media: Merapi

Hari: Jumat

Tanggal: 02 Juli 2021

Halaman: 1

KASUS CORONA MASIH MEROKET
PPKM Darurat di Yogya, Alkid
Hingga Tamansari Tutup

YOGYA (MERAPI). Pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat di Jawa dan Bali mulai 3-20 Juli 2021. Kota Yogyakarta juga bersiap menjalankan kebijakan untuk mengurangi penularan Covid-19 itu. Masyarakat diharapkan serentak menjalankan PPKM darurat terutama menekan mobilitas.

Wakil Walikota Yogyakarta Heroe Poerwadi mengaku secara resmi belum menerima petunjuk teknis terkait kebijakan PPKM darurat Jawa dan Bali.

Dia menyampaikan aturan yang beredar masih dalam bentuk draf dan sempat dibahas pemerintah pusat dengan para gubernur. Meski demikian pihaknya menyatakan Pemkot Yogyakarta siap menjalankan kebijakan pemerintah pusat itu.

"Kami juga siap menjalankan kebijakan dari pemerintah pusat. Karena ini menjadi konsen kami untuk mengatasi permasalahan sebaran Covid-19 yang semakin tinggi di berbagai kota," kata Heroe, Kamis (1/7).

Menurutnya penularan kasus Covid-19 di Kota Yogyakarta dalam 3 minggu terakhir sangat tinggi dan cepat. Tapi sampai kini pihaknya belum mendapatkan laporan tentang adanya varian baru Covid-19 di Kota Yogyakarta. Berdasarkan peta risiko sejumlah kelurahan di Kota Yogyakarta masuk zona merah dan sejumlah kemantren dominan zona merah.

Dicontohkan pada Januari-Mei 2021 kasus Covid-19 di Kota Yogyakarta bisa turun setelah pada bulan Oktober-Desember 2021 kasus tinggi. Dengan kasus yang sangat tinggi selama 3 minggu ini dia menilai perlu langkah-langkah yang sifatnya langsung bisa menyelesaikan persoalan. Salah satu harapannya melalui kebijakan PPKM darurat Jawa Bali untuk mempercepat penurunan sebaran Covid-19.

"Yang paling penting adalah menekan mobilitas dan interaksi masyarakat. Dalam dua minggu ke depan harus serempak bersama-sama menghentikan sebaran ini. Kalau nanti ada keputusan drastis dari pemerintah pusat kami siapkan. Baik proporsi perkantoran WFO dan WFH diperbanyak maupun pembatasan kegiatan sektor ekonomi. Tapi tetap memberikan kesempatan sektor-sektor penting hajat hidup orang banyak buka," jelasnya.

Dia menyatakan posko-posko PPKM mikro di RT/RW diharapkan bisa menjaga mobilitas dan interaksi di wilayah agar tidak terjadi perkembangan kasus Covid-19. Termasuk meminta wilayah tidak memberikan izin kegiatan yang melibatkan kerumunan orang.

Sektor-sektor wisata di Kota Yogyakarta juga sudah tutup. Dia mencantumkan sektor wisata kompleks Kraton Yogyakarta seperti museum, Tamansari sampai Alun-alun Kidul ditutup sampai 2 minggu. "Kalau Malioboro belum selesai (menutup). Kami tunggu dulu aturan resmi PPKM darurat. Tapi kami sudah antisipasi agar orang yang ke Malioboro sehat. Seperti memeriksa surat-surat kesehatan di lokasi tempat parkir wisata. Kalau tidak bawa, tidak boleh turun," tambah Heroe.

Selain itu ada penegakan protokol kesehatan di semua satgas di kelurahan kemantren, TNI dan Polri bersama turun ke bawah mendorong masyarakat betul-betul menjalankan protokol kesehatan secara serius.

Dia menyebut ada banyak masukan dari masyarakat agar ada tindakan represif bagi pelanggaran protokol kesehatan dengan sanksi denda dan sebagainya untuk efek jera. Dalam rapat gubernur dan daerah lain juga mengkaji sanksi denda, sosial dan lainnya agar jelas dan sama.

"Kalau aturan umum sudah ada semua baik denda, sanksi sosial hingga penutupan. Jadi kami tinggal mengaktifkan itu saja tetapi harus menjadi konsen semuanya. Bukan untuk menghukum masyarakat tapi untuk membuat masyarakat sadar betul. Kita harus menunjukkan kita bisa menghentikan sebaran Covid-19," tandasnya.

Sementara itu, Pemda DIY melaporkan penambahan 895 kasus positif Covid-19, Kamis (1/7) sehingga total kasus terkonfirmasi menjadi 61.354 kasus.

"Penambahan kasus sembuh sebanyak 365 kasus sehingga total sembuh menjadi 48.898 kasus dan 37 kasus meninggal sehingga total kasus meninggal menjadi 1.596 kasus," ujar Juru Bicara Pemda DIY untuk penanganan Covid-19, Berty Murtiningsih.

Distribusi kasus terkonfirmasi Covid-19 terdiri dari 158 warga Kota Yogyakarta, 236 warga Bantul, 64 warga Kulon Progo, 62 warga Gunungkidul, dan 375 warga Sleman.

"Rincian riwayat kasus terdiri dari 257 kasus periksa mandiri, 612 kasus hasil tracing kasus sebelumnya, 9 kasus hasil screening karyawan kesehatan, 5 kasus perjalanan luar daerah, dan 12 kasus belum ada info," ujarnya.

Distribusi kasus sembuh terdiri dari 45 warga Kota Yogyakarta, 154 warga Bantul, 24 warga Kulon Progo, 64 warga Gunungkidul, dan 78 warga Sleman. (Tri/C-4)

2.
3.

☒ Positif ☐ Segera ☐ Untuk Diketahui

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Kecamatan/Kemantren Kraton			
3. BPBD			
4. Sat Pol PP			
5. Dinas Pariwisata			

Yogyakarta, 11 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005